**BAB II**

**Situasi & Kondisi Geopolitik Uni Eropa**

1. **Deskripsi Umum Uni Eropa**

Uni Eropa merupakan organisasi yang terintegrasi berdasarkan kesamaan wilayah geografis dan kesamaan penting, mereka memiliki tujuan jangka panjang di bidang-bidang politik, ekonomi, militer, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta hukum sebagai *mainstream* mereka.[[1]](#footnote-1)

Organisasi ini memiliki 27 negara anggota setelah Inggris memilih untuk keluar atas hasil referendum. Dibentuk dengan tujuan kesatuan ekonomi kemudian berevolusi menjadi organisasi yang mencakup di segala bidang kebijakan, mulai dari iklim, lingkungan dan kesehatan hingga hubungan eksternal dan keamanan, keadilan dan imigrasi. Hal ini tercermin dari perubahan nama dari *European Economic Community* (EEC) menjadi *European Union* (EU) pada 1993. Uni Eropa didasarkan pada peraturan hukum dimana semua hal yang dilakukannya didasarkan pada perjanjian, secara sukarela dan disetujui oleh negara-negara anggotanya secara demokrasi. Lembaga organ penting dan UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.[[2]](#footnote-2)

1. **Sejarah Uni Eropa**

Sebelumnya gagasan untuk mempersatukan Eropa telah ada sebelum PD II, hal ini secara tidak langsung diawali dengan lahirnya pemikiran konsep-konsep geopolitik dan geostrategi untuk memenuhi kebutuhan Revolusi Industri pada abad ke-16. Kepentingan ekonomi menjadi latar belakang diberlakukannya geostrategi berupa ekspansi wilayah dan menciptakan struktur kolonialisme dan imperialisme, serta memperkuat armada militer untuk menjaga daerah jajahan mereka. Hal ini dapat dilihat secara langsung ketika terjadi *The Scrambled of Africa* setelah adanya Kongres Wina 1815 dan masa kolonialisme di Asia Tenggara, yang membawa semangat *Gold, Glory, Gospel* untuk menjaga keberlangsungsan hubungan Eropa dengan wilayah koloninya. Namun, lambat laut negara-negara ini mengalami konflik berkepanjangan yang berujung pada perang akibat saling berkompetisi.

Jatuhnya Eropa semakin diperkuat akibat dampak dari berbagai peristiwa besar, seperti *Great Depression* 1930, Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin. Sistem ekonomi yang luluh lantak menjadikan bangsa-bangsa Eropa harus bangkit dan mengembalikkan kejayaannya. Ide untuk mempersatukan Eropa atau Pan Eropa ke dalam sebuah wadah kemudian muncul sebagai upaya untuk meredam konflik yang disebabkan perang. Diawali oleh Richard Graf Coudenhove dari Austria di tahun 1923 yang menganjurkan pembentukan Eropa Serikat sebagai salah satu badan yang hendaknya dapat menghindarkan timbulnya perang.[[3]](#footnote-3)

Winston Churchil kemudian juga melontarkan gagasannya untuk menyatukan Eropa dalam pidatonya di Universitas Zurich pada tanggal 19 Desember 1946. Churchil memandang perlunya dibentuk Dewan Eropa sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan Eropa dari ancaman perang. Pemikiran Churchil akan Eropa Bersatu pun melahirkan sebuah organisasi bernama *United Europe Movement*, asosiasi ini bertempat di Brussels dan menyatukan individu swasta dan organisasi penolong untuk bekerja pada pembangunan Eropa yang lebih bersatu. Pada 7-11 Mei 1948, di bawah kepemimpinan Churchil, diselenggarakan sebuah kongres di Hague. Ada empat hal yang diserukan Churchil dalam kongres tersebut. Pertama, reduksi tarif. Kedua, pergerakan bebas manusia. Ketiga, ide dan properti untuk pertahanan Eropa. Keempat, pembentukan majelis Eropa yang dipilih secara universal berdasarkan piagam hak asasi.

Gagasan-gagasan untuk dilakukannya unifikasi Eropa untuk menghindarkan perang-perang lainnya muncul silih berganti, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Robert Schuman, Henry Spaak dan Gyu Mollet yang berhasil mendirikan Gerakan Eropa pada tahun 1947 dan berhasil mengadakan kongresnya yang pertama di tahun 1948 bertempat di Den Haag, Belanda.

Apa yang dikenal dengan Deklarasi Schuman adalah cikal bakal dari terbentuknya *European Coal Steel Community* (ECSC) yang merupakan buah hasil pemikiran Jean Monnet. Penyatuan industri baja dan batu bara ini didasari atas kondisi ketergantungan negara-negara Eropa pada produksi baja dan batu bara pada saat itu. Batu bara dari Eropa Timur telah menjadi sangat langka, sementara batu bara Amerika masih sangat mahal dan hanya bisa dibeli dengan dolar, yang tidak bisa dijangkau Eropa. Kondisi ini menciptakan potensi konflik. Adapun negara yang paling memungkinkan untuk konflik ialah Perancis dan Jerman. Terkait dengan konflik tersebut, Jean Monnet, salah satu yang memiliki andil untuk mengusahakan perdamaian Eropa sejak perang. Monnet menyiapkan dokumen yang berjudul *Plan de Modernisation et d’Equipment*, sebuah rencana kebangkitan dan modernisasi bagi Perancis, yang difokuskan secara khusus pada industry batu bara dan baja, yang di waktu itu disadari sebagai kunci utama dan penting bagi rekonstruksi.[[4]](#footnote-4)

Penyatuan industri baja pun dilihat sebagai penghancuran pengaruh potensial kartel serta mencegah pengembangan kembali peralatan perang di masa depan. Akhirnya, dari sebuah pandangan simbolik mengenai industry baja, kebutuhan akan penyatuan industry baja berarti bahwa Perancis dan Jerman akan semakin jauh dari bayang-bayang perang. Dengan pembentukan suatu Eropa yang terintegrasi, kekhawatiran akan bangkitnya dominasi Jerman dalam bidang industri yang menimbulkan rasa takut di Eropa akan segera lenyap. Pembentukan Eropa terintegrasi akan menciptakan kondisi yang sehat bagi industry Jerman, Perancis, dan Eropa yang memungkinkan dilakukannya ekspansi industry, di dalam kompetisi tanpa dominasi.

Atas pemikiran Monnet tersebut, Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman pada 9 Mei 1950 mengajukan sebuah rencana untuk semakin mempererat kerjasama dan mengusulkan supaya Jerman dan negera-negara Eropa lainnya untuk menyatukan kepentingan ekonomi mereka. Ada tiga hal pokok yang diusulkan Schuman, pertama, keamanan dunia tidak akan terwujud tanpa penciptaan upaya-upaya kreatif yang sebanding terhadap bahaya-bahaya yang mengancamnya. Kedua, Eropa tidak akan terbentuk dalam sekali atau berdasarkan sebuah rencana. Melainkan, melalui pencapaian-pencapaian nyata yang membentuk solidaritas secara menyeluruh. Ketiga, penyatuan produksi batu bara dan baja yang telah lama ditujukan untuk industri amunisi perang, yang paling banyak memakan korban, akan mengubah takdir Eropa.[[5]](#footnote-5)

Rencana Paris ini diterima baik oleh negara-negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Belgia, Belanda dan Luksemburg. Tanggal 18 April 1951, Perancis bersama kelima negara tersebut menandatangani Deklarasi Schuman dan sepakat untuk membentuk *European Coal and Steel Community* (ECSC).

Sejak dilaksanakan tahun 1952, ECSC menjadi langkah pertama menuju sebuah organisasi supranasional di mana negara-negara menyerahkan bagian dari kedaulatan mereka, membuka pasar batu bara dan baja di semua negara anggota, dan memungkinkan mereka untuk diatur dengan organisasi internasional. Pada tanggal 1-3 Juni 1955 diadakan Konferensi Messina yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri anggota ECSC, dalam konferensi tersebut para Menteri Luar Negeri menyatakan keinginan mereka untuk memulai negosiasi di dua level sekaligus: integrasi parsial, terutama di bidang transportasi, energi konvensional dan energy nuklir serta penciptaan pasar bebas. Kemudian dalam konferensi tersebut ditetapkan tiga tujuan, pertama, pertumbuhan perdagangan dan migrasi penduduk membutuhkan pengembangan bersama saluran utama komunikasi. Kedua, menempatkan lebih banyak energy berlimpah dengan harga lebih murah di pembuangan ekonomi Eropa merupakan elemen dasar kemajuan ekonomi. Ketiga, pengembangan energy atom untuk tujuan damai akan segera membuka prospek revolusi industry baru selama serratus tahun terakhir.[[6]](#footnote-6)

Komite Antarpemerintah yang ditetapkan dalam Konferensi Messina mengadakan pertemuan pertama tanggal 9 Juli 1955 dengan tugas menyusun laporan yang akan memberikan garis besar tentang masa depan *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (EAEC). Pada tanggal 21 April 1956 Komite Antarpemerintah menerbitkan Spaak Report yang menetapkan garis besar masa depan EEC dan EAEC. Laporan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, berurusan dengan pasar bersama. Kedua, Euratom. Ketiga, area yang dianggapa paling membutuhkan tindakan mendesak.[[7]](#footnote-7)

Atas hasil pertemuan dan perdebatan yang cukup rumit dan panjang, lahirlah kemudian Perjanjian Roma yang mendirikan Traktat terpisah mengnai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Masyarakat Eropa Energi Atom (EAEC).

Setelah parlemen keenam negara ECSC meratifikasi kedua Traktat tersebut pembentukan MEEA secara resmi disahkan dan berlaku pada tanggal 1 Januari 1958 dengan Presiden MEE pertama, Walter Hallstein dari Jerman. Antara 1958 sampai dengan 1970, penghapusan tarif bea masuk dalam perdagangan antara enam negara tersebut, memberika hasil yang positif, yaitu perdagangan intra MEE melonjak enam kali lipat, sedangkan perdagangan MEE dengan dunia luar naik tiga kali lipat dan rata-rata tingkat pertumbuhan PDB mencapai 70%.

Pada tanggal 17 dan 28 Februari 1986, di Luksemburg dan Den Haag, para Menteri Luar Negeri menandatangani Single European Act (SEA). Perjanjian ini merupakan hasil dari negosiasi panjang sebagai bagian dari Konferensi Antarpemerintah, menggabungkan dalam satu teks ketentuan yang berkaitan, khususnya, untuk reformasi lembaga dengan perpanjangan kekuasaan dan tanggung jawab masyarakat dan kerjasama di bidang kebijakan luar negeri Eropa. Selain itu, mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa yang ditargetkan dicapai sebelum 31 Desember 1992. SEA mulai berlaku tanggal 1 Juli 1987.[[8]](#footnote-8)

Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin, diikuti dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur tanggal 3 Oktober 1990, terlepasnya kontrol Uni Soviet, serta diikuti dengan pengaruh demokratisasi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta disintegrasi Uni Soviet pada Desember 1991, mengubah interaksi negara-negara Eropa dengan mempererat hubungan dan menegosiasikan traktat baru yang pokok-pokok utamanya disetujui pada Pertemuan Dewan Eropa tanggal 9 dan 10 Desember 1991. Hasil pertemuan tersebut kemudian melahirkan *Treaty of European Union*atau juga sering disebut Traktat Maastrichtpada 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993. Perjanjian tersebut mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu seperti *ECSC*, *Euratom*, dan *EEC* juga menambahkan kerjasama di bidang lain yaitu *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* dan *Justice Home Affairs (JHA)*.

Traktat Maastricht memberikan dimensi baru pada integrasi Eropa. Masyarakat Eropa yang bertitik tolak dari dimensi ekonomi, telah berubah menjadi Uni Eropa yang berdiri diatas tiga pilar:

1. Pilar ekonomi, yaitu berdasarkan pasar tunggal Eropa menuju Uni Ekonomi dan Moneter atau *Economic and Monetary Union (EMU)*
2. Pilar politik, yaitu berlandaskan pada kebijakn di bidang luar negeri dan keamanan bersama atau *Common Foreign and Security Policy (CFSP)*
3. Pilar sosial-hukum, yaitu yang menyangkut peradilan dan masalah dalam negeri atau *Justice and Home Affair (JHA).*

Tabel 2.1Kronologi Pembentukan Uni Eropa 1951-1992

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | Agenda | Hasil Utama |
| 18 April 1951 | Pelaksanaan Penandatanganan Traktat Paris oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Perancis yang bertempat di Paris | 1. Membentuk *European Coal and Steel Community* (ECSC) dengan menghapus hambatan perdagangan di bidang batu bara dan baja 2. Menghapus rivalitas lama antara Perancis dan Jerman dan memberi dasar bagi pembentukan Federasi Eropa |
| 25 Maret 1957 | Pelaksanaan Penandatanganan Traktat Roma oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Perancis yang bertempat di Messina, Italia | Membentuk:   1. *European Atomic Economy Community* (EAEC) atau Euratom 2. *Eropean Economic Community* (EEC) atau Masyarakat Ekonomi (MEE) 3. Dewan Menteri Masyarakat Ekonomi Eropa 4. Badan Audit Masyarakat Eropa |
| 1 Juli 1967 | Pelaksanaan Penandatanganan The Merger Treaty oleh Belanda, Belagia, Italita, Jerman, Luksemburg, dan Perancis | Menggabungkan EAEC, Euratom dan EEC ke dalam suatu komunitas yang dikenal dengan *European Community* (EC) |
| 14 Juni 1985 | Pelaksanaan Penandatanganan Traktat Schengen oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, dan Perancis yang bertempat di Schengen, Luksemburg | Menghapuskan pemeriksaan di perbatasan neagra-negara penandatangan Traktat Schengen |
| Februari 1986 | Pelaksanaan Penandatanganan *Single European Act* | 1. Merealisasikan Pasar Internal 2. Membentuk Forum Koordinasi dan Konsultasi antar Pemerintah 3. Seluruh asosiasi dan kerjasama serta perluasan masyarakat Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa |
| 7 Februari 1992 | Pelaksanaan Penandatanganan The Treaty on European Union atau Traktat Maastricht | 1. Mengubah *European Community* menjadi *European Union* 2. Membentuk tiga Pilar Kerjasama UE yaitu *European Communities*, *Common Foreign and Security Policy*, dan *Justice and Home Affairs* |

Sumber: Diolah dari European Communites, A Constitution for Europe (Luxembourg: European Communities, 2004)

1. **Kedudukan, Peran, dan Fungsi Uni Eropa**
   1. Tujuan Uni Eropa

Pada dasarnya integrasi ekonomi, politik, keamanan dan kebudayaan Uni Eropa dimaksudkan untuk meningktakan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Eropa serta menciptakan stabilitas kawasan sesuai dengan prinsip Uni Eropa yaitu “*Peace, Prosperity, and Progress*”.

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Uni Eropa secara resmi tercantum dalam *Treaty of European Union* Pasal 13. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa tujuan Uni Eropa harus diarahkan pada:

1. Pengembangan kemajuan ekonomi dan sosial yang telah seimbang dan berkelanjutan, terutama melalui penciptaan wilayah tanpa batas internal melalui penguatan persatuan ekonomi dan keuangan yang pada puncaknya mencakup mata uang tunggal yang disesuaikan dengan ketetapan yang ada dalam perjanjian
2. Penegasan identitas dikancah internasional, khususnya melalui implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama yang nantinya akan menuju pertahan bersama
3. Memperkuat perlindungan hak-hak kepentingan nasional dari negara-negara anggota melalui pengenalan kewarganegaraan Uni Eropa
4. Pengembangan kerjasama yang dekat dengan keadilan dan urusan rumah tangga sendiri

Mempertahankan secara penuh *Acquis Communitarie* dan membangun diatasnya, pandangan untuk mempertimbangkan melalui prosedur yang berkaitan dengan konferensi antar pemerintahan yang disidangkan tahun 1996 untuk memeriksa revisi traktat Uni Eropa, yang memperluas kebijakan-kebijakan dan bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenalkan oleh perjanjian dengan tujuan untuk meyakinkan keefektifan dari mekanime dan institusi komunitas.

* 1. Struktur Lembaga Uni Eropa

Keberadaan institusi-institusi di dalam Uni Eropa diatur dalam pasal 13 Traktat EU (sebelumnya berada di dalam pasal 7 EC). Dalam pasal 13 disebutkan bahwa institusi-institusi Uni Eropa terdiri dari *the European Parliament, the European Coouncil, the Council (of Minister), the Commission, the Court of Justice, the European Central Bank,* dan *the Court of Auditors*. Dalam badan institusi Uni Eropa, terdapat tiga pilar utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi-institusi diatas tersebut termasuk ke dalam tiga pilar utama ini.

Di badan eksekutif, terdapat *European Commission* (EC). Layaknya fungsi eksekutif dalam sebuah negara, EC juga memiliki fungsi yang sama dengan badan eksekutif di sebuah negara, salah satunya ialah mengusulkan dan menerapkan undang-undang dan memberikan dasar hukum Uni Eropa. *European Commission* terdiri atas 25 komisioner (termasuk presiden komisioner, saat ini adalah Jose Manuel D. Barroso) yang mewakili tiap-tiap negara anggota Uni Eropa[[9]](#footnote-9).

Berikutnya ialah badan legislatif, yang di dalamnya terdapat *European Parliament* dan *Council of Ministers*. *European Parliament* (EP) mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak mempunyai hak untuk mengusulkan undang-undang, tetapi dapat membuat amandemen dan mempunyai hak veto pada setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh komisioner, presiden yang memimpin saat ini adalah Antonio Tajani. Selain itu EP juga berfungsi untuk mengawasi EC. Sedangkan *Council of Ministers* atau sering juga disebut dengan *Council of the European Union*, yang di dalamnya terdapat 27 menteri yang mewakili tiap negara anggota Uni Eropa. Keanggotaannya bergantung pada topic atau isu yang dibahas pada saat itu. Kedua badan ini cukup berpengaruh dalam Uni Eropa karena tidak ada kebijakan yang dapat di implementasikan tanpa persetujuan dari dua badan tersebut.[[10]](#footnote-10)

Kemudian yang terakhir ialah pilar yudikatif dimana di dalamnya terdapat *European Court of Justice* (ECJ). Badan ini terdiri dair 27 hakim yang dibantu oleh delapan *advocates-general*, dan dipimpin oleh seorang presiden, sekarang dijabat oleh Vassilios Skouris yang telah menjabat sejak tahun 2003 lalu. Fungsi dari ECJ ialah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, benar-benar diinterpretasikan, dan juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan sifatnya tidak clash dengan kebijakan tiap negara anggota.[[11]](#footnote-11)

Selain ketiga badan tersebut ada pula badan penting yang bertugas menentukan arah dan prioritas umum Uni Eropa, yaitu *European Council* (EC). EC beranggotakan kepala negara atau kepentingan pemerintahan negara-negara anggota, ditambah Presiden Komisi Eropa, didukung oleh menteri luar negeri dan seorang anggota komisi. Presiden yang memimpin sekarang adalah Donald Tusk. *European Council* mewakili tingkat tertinggi dari kerjasama politik antara negara-negara Uni Eropa.[[12]](#footnote-12)

Selain kebijakan yang bersifat politik, Uni Eropa juga mengurus kebijakan yang bersifat keuangan. Kebijakan ini diatur oleh *European Court of Auditors*. Modelnya hamper menyerupai kebijakan *European Court of Justice*, namun dalam pengurusan anggaran, proposal yang dikeluarkan oleh Komisi tidak harus disetujui oleh kedua badan legislative, namun hanya membutuhkan persetujuan dari salah satu pihak sajat, baik itu dari EP maupun dari *Council of Ministers*. Setelah anggaran diturunkan European Court of Auditors yang kemudian mengawasi penggunaanya.

Bank sentral Eropa atau *The European CentralBank* (ECB) adalah salah satu dari tujuh lembaga-lembaga UniEropa yang tercantum dalam Traktat Uni Eropa. Merupakan bank sentral untuk euro dan mengelola dengan kebijakanmoneter dari 17 negara anggota Uni Eropa yang merupakan zonaeuro.ECB adalah salah satu bank sentral yang paling penting di dunia.

Modal saham bank ini dimiliki oleh bank-bank sentral dari semua 27 negara anggota Uni Eropa. Bank didirikan oleh Perjanjian Amsterdam pada tahun 1998, dan berkantor pusat di Frankfurt, Jerman.Tujuan utama dari Bank Sentral Eropa, sebagaimana diamanatkan dalam Statuta ECB adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam *Eurozone*. Tugas dasar dari ECB adalah menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk zona euro, untuk melakukan operasi valuta asing, untuk mengurus cadangan devisa dari sistem Eropa Bank Sentral dan mempromosikan kelancaran infrastruktur pasar keuangan di bawah sistem pembayaran dan platform teknis. Selain itu ECB memiliki hak eksklusif untuk mengotorisasi penerbitan uang kertas euro.

1. **Perluasan Keanggotaan Uni Eropa**
2. **Keanggotaan Uni Eropa**

Pada awal pembentukannya, Uni Eropa hanya terdiri dari Perancis, Jerman Barat, Belgia, Luksemburg, Belanda dan Italia. Perluasan Uni Eropa sepanjang perjalanannya telah melalui empat kali proses perluasan. Perluasan pertama terjadi pada tahun 1973 dengan ditandai masuknya Inggris, Denmark, dan Irlandia yang membuat keanggotaan menjadi 9 negara. Perluasan kedua kemudian dilakukan kea rah selatan dengan masuknya Yunani sebagai anggota tahun 1981, Portugal dan Spanyol pada 1986 menambah keanggotaan menjadi 12, perluasan yang keempat terjadi pada tahun 1995 dengan masuknya 3 negara yaitu Austria, Finlandia, dan Swedia. Pada proses perluasan selanjutnya Uni Eropa memfokuskan diri kepada negara-negara Eropa Timur dan Tengah dimana pada 1 Mei 2004 sepuluh negara secara resmi bergabung, yaitu Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slovenia, dan Slowekia. Kemudian disusul oleh Rumania pada 2007 dan yang terakhir adalah Kroasia pada 1 Juli 2013. Perluasan ini membuat Uni Eropa memilikin 28 negara anggota sebelum akhirnya Inggris keluar dari Uni Eropa anggota[[13]](#footnote-13). Berikut ini adalah daftar 27 negara anggota Uni Eropa beserta ibu kota dan tahun bergabungnya.

Tabel 2.2 Daftar Anggota Uni Eropa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | **Ibu Kota** | **Mata Uang** | **Tanggal Bergabung** |
| Austria | Vienna | Euro | 1 Januari 1995 |
| Belanda | Armsterdam | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri) |
| Belgia | Brussels | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri) |
| Bulgaria | Sofia | Lev | 1 Januari 2007 |
| Denmark | Kopenhagen | Danish krone | 1 Januari 1973 |
| Estonia | Tallinn | Euro | 1 Mei 2004 |
| Finlandia | Helsinki | Euro | 1 Januari 1995 |
| Hongaria | Budapest | Forint | 1 Mei 2004 |
| Irlandia | Dublin | Euro | 1 Januari 1973 |
| Italia | Roma | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri) |
| Jerman | Berlin | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri) |
| Kroasia | Zagreb | Kuna | 1 Juli 2013 |
| Latvia | Riga | Euro | 1 Mei 2004 |
| Lituania | Vilnius | Litas | 1 Mei 2004 |
| Luksemburg | Luksemburg | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri) |
| Malta | Valletta | Euro | 1 Mei 2004 |
| Perancis | Paris | Euro | 23 Juli 1952 (Pendiri) |
| Polandia | Warsawa | Zloty | 1 Mei 2004 |
| Portugal | Lisbon | Euro | 1 Januari 1986 |
| Republik Ceko | Praha | Czech koruna | 1 Mei 2004 |
| Rumania | Bukares | Romanian leu | 1 Januari 2007 |
| Siprus | Nikosia | Euro | 1 Mei 2004 |
| Slovenia | Ljubljana | Euro | 1 Mei 2004 |
| Slowakia | Bratislava | Euro | 1 Mei 2004 |
| Spanyol | Madrid | Euro | 1 Januari 1986 |
| Swedia | Stockholm | Krona | 1 Januari 1995 |
| Yunani | Athena | Euro | 1 Januari 1981 |

Sumber: Diolah dari Petrikor Immanuel, S.S, Sejarah Uni Eropa (Yogyakarta:2016)

1. **Syarat Keanggotaan Uni Eropa**

Menyimak potensi besar yang dimiliki oleh Uni Eropa sebagai wadah ekonomi dan politik memberikan daya tarik sendiri bagi banyak negara di Eropa yang mempunyai hasrat untuk bergabung. Oleh karenanya, pihak Uni Eropa memperketat seleksi terhadap negara-negara Eropa yang berkeinginan untuk bergabung. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam Traktat Maastricht pasal 49 menyatakan negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa.

* 1. Kriteria Kopenhagen

Untuk menjadi anggota Uni Eropa setiap calon anggota harus memenuhi syarat-syarat yang tertulis pada kriteria Kopenhagen terlebih dahulu. Kriteria Kopenhagen adalah peraturan yang menetapkan apakah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria tersebut antara lain meliputi:[[14]](#footnote-14)

1. Diterapkannya demokrasi, mempunyai dasar hukum, menghormati hak asasi manusia dan kaum minoritas.
2. Menganut asas ekonomi pasar dan mempunyai kapasitas untuk mengatasi tekanan persaingan
3. Kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban sebagai anggota organisasi (termasuk di dalamnya menerapkan secara efektif peraturan dan kebijakan Uni Eropa)

Secara terperinci ketiga hal tersebut dikategorikan ke dalam Kriteria Politik, Kriteria Ekonomi, dan Kriteria Acquis. Selama negosiasi, masing-masing negara calon anggota, harus melalui tahapan menuju pencapaian kriteria Kopenhagen dan dipantausecara rutin. Melalui dasar tersebut, keputusan dibuat mengenai apakah dan kapan suatu negara harus bergabung, atau tindakan apa yang perlu diambil sebelum memungkinkan penggabungan dengan Uni Eropa.

* + 1. Kriteria Politik

1. Demokrasi

Pemerintahan demokratis yang berfungsi mensyaratkan agar semua warga negara bisa berpartisipasi, atas asas setara, dalam pembuatan keputusan politik di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari kotamadya setempat hingga tingkat nasional. Selain itu,perlu pula diadakannya pemilihan umum yang bebas dengan kotak suara rahasia, hak mendirikan partai politik tanpa gangguan dari negara, akses pers bebas yang adil dan setara, organisasi serikat dagang bebas, kebebasan berpendapat, dan kekuasaan eksekutif yang dibatasi hukum dan memungkinkan akses bebas kepada hakim yang bukan berasal dari golongan eksekutif.

1. Aturan Hukum

Aturan hukum menegaskan bahwa otoritas pemerintah hanya bisa dilaksanakan sesuai hukum tertulis, yang diadopsi melalui prosedur tetap.Prinsipnya ditujukan sebagai pelindung terhadap aturan arbitrase dalam kasus-kasus perorangan.

1. Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap sebagai perumusan hak asasi manusia paling tinggi, meski kurang memiliki mekanisme penegakan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang lebih efektif. Persyaratan untuk sejajar dengan perumusan ini memaksa beberapa negara yang baru saja bergabung dengan UE untuk memberlakukan perubahan besar dalam undang-undang mereka, pelayanan publik dan sistem hukum. Banyak perubahan tersebut mencakup perlakuan etnis dan kaum minoritas beragama, atau penghapusan celah perlakuan antara faksi-faksi politik.

* + 1. Kriteria Ekonomi

Uni Eropa merupakan pasar tunggal terbesar di dunia yangmemiliki pengaruh sekitar 20 % dari total perdagangan dunia. Ditinjau dari sejarah perekonomianya Uni Eropa mempunyaifondasi perekonomian yang kuat di bidang industri manufaktur, namun walaupun di bidang manufaktur dan di bidang jasa Uni Eropa sangat kuat, dari segi komoditi dan semi-manufaktur sangat lemah. Hal ini disebabkan selain karena faktor iklim, juga disebabkan karena tingginya biaya faktor produksi. Dalam Integrasi Ekonomi, negara-negara Eropa diwajibkan menghapus hambatan-hambatan ekonomi diantara dua atau lebih perekonomian antar negara, definisi operasionalnya adalah pencabutan diskriminasi dan penyatuan kebijakan seperti norma, peraturan, prosedur. Instrumennya antara lain: bea masuk, pajak,mata uang, UU, lembaga, Standarisasi, kebijaksanaan ekonomi, menghapusan proteksi lalu lintas barang, jasa, faktorproduksi dan informasi dengan kata lain kebebasan akses pasar.

Zona Eropa atau dapat disebut juga dengan sistem Euro ataunegara Euro merupakan kumpulan negara anggota Uni Eropa yangmengadopsi penggabungan mata uang Euro *(EuroCurrencyUnion).*Dengan demikian negara tersebut menyerahkan kebijakanmoneternya kepada Bank Sentral Eropa di Frankfurt,Jerman.Sebelum disetujui untuk bergabung, calon negara anggotaharus memenuhi kriteria konvergen.Zona Euro resmi diluncurkan 1 Januari 1999, walau mata uangnya baru dicetak 1 Januari 2002.Dalam menjalankan tugas ke-administrasiannya anggaran UniEropa dari sisi pendapatan diperoleh dari setoran Negara anggotayang terdiri dari:[[15]](#footnote-15)

* Pajak Impor

Pajak impor dikenakan atas nama Uni Eropa oleh negaratempat masuk barang pertama kali ke Uni Eropa yang kemudianharus disetor ke Uni Eropa. Negara pemungut diperbolehkanmempergunakan seperempat dari pendapatan pajak untuk menutupbiaya administrasi pemungutan. Komisi Eropa menjalankan sistempengawasan guna menghindari pelanggaran aturan.

* Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan yang dipungut tertentu dari warga negara anggota berdasarkan tingkat PPN yang dikenakan oleh masing-masingnegara anggota berdasarkan proporsi tertentu.Tingkat ppndan keringanan berbeda untuk tiap-tiap negara anggota.Oleh karenaitu dibuatlah rumus basis ppn yang setara yang harus dibayarkan keUni Eropa (proporsional).Pendapatan dari PPN Uni Eropa = (TotaL PPN x basis pajak)-Barang bebas PPN menurut Directive Uni Eropa. Untuk itu setiap negara anggota harus melaporkan pendapatan PPN mereka kepada Uni Eropa.Uni Eropa melakukan inspeksi ke negaraanggota yang biasanya dilakukan oleh Dirjen Anggaran dan DirjenPajak yang hasilnya dilaporkan kembali ke negara yangbersangkutan untuk merespon temuan yang ada sampai kedua belahpihak tidak mempermasalahkan lagi.Komisi penasehat yangmerupakan perwakilan untuk tiap negara anggota juga menerimadan aktif dalam negosiasi masalah. Masalah yang tidak bisadinegosiasikan akan diserahkan ke pengadilan Uni EropaPembayaran dilakukan setiap bulanya oleh negara anggota kekomisi Uni Eropa berdasarkan perkiraan tahun lalu yang akandikoreksi kemudian.

* Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah sumber terbesar dari anggaran Uni Eropa yangsaat ini menggunakan basis pengenaan yang sama untuk setiapnegara anggota yakni sebesar 1,24 % dari PDB. Besarnya PDBdihitung oleh ahli anggaran nasional yang bekerja di Eurostat atasnama Dirjen Anggaran. Semua informasi penting harus sudahdiserahkan sebelum 22 September setelah tahun anggaran berakhiryang juga diikuti dengan inspeksi. Pembayaran dilakukan setiapbulanya oleh negara anggota ke komisi UE berdasarkan perkiraantahun lalu yang akan dikoreksi kemudian.

* + 1. Kriteria *Acquis*

Terakhir, dan secara teknis di luar kriteria Kopenhagen, adapersyaratan lanjutan bahwa semua anggota prospektif harusmemberlakukan undang-undang agar hukum mereka sejajar denganbadan hukum Eropa yang dikembangkan sepanjang sejarah Uni, yangdikenal sebagai *acquis communautaire*. Dalam mempersiapkanpenggabungannya, *acquis* dibagi menjadi beberapa bab, masing-masingbab menangani wilayah kebijakan yang berbeda. Untukproses perluasan kelima yang diakhiri dengan masuknya Bulgaria danRumania pada tahun 2007, terdapat 31 bab. Dan yang terakhir adalahmasuknya Kroasia pada tahun 2013 yang telah menyelesaikan 35bab yang terdiri dari:[[16]](#footnote-16)

* + 1. *Free movement of goods*
    2. *Free movement of workers*
    3. *Right of establishment and freedom to provide services*
    4. *Free movement of capital*
    5. *Public procurement*
    6. *Company law*
    7. *Intellectual property law*
    8. *Competition policy*
    9. *Financial services*
    10. *Information society and media*
    11. *Agriculture and rural development*
    12. *Food safety, veterinary and phytosanitary policy*
    13. *Fisheries*
    14. *Transport policy*
    15. *Energy*
    16. *Taxation*
    17. *Economic and monetary policy*
    18. *Statistics*
    19. *Social policy and employment*
    20. *Enterprise and industrial policy*
    21. *Trans-European networks*
    22. *Regional policy and coordination of structural instruments*
    23. *Judiciary and fundamental rights*
    24. *Justice, freedom and security*
    25. *Science and research*
    26. *Education and culture*
    27. *Environment*
    28. *Consumer and health protection*
    29. *Customs union*
    30. *External relations*
    31. *Foreign, security and defence policy*
    32. *Financial control*
    33. *Financial and budgetary provisions*
    34. *Institutions*
    35. *Other issues*

1. **Sikap Negara Anggota Terhadap Kebijakan Perluasan**

Perluasan keanggotaan merupakan isu yang harus dihadapi oleh Uni Eropa di masa kontemporer. Diawali oleh enam Negara pendiri, kini Uni Eropa sudah memiliki 27 negara anggota. Jumlah keanggotaan ini dapat dipastikan terus bertambah seiring dengan banyaknya Negara yang mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa. Keinginan Negara-negara calon anggota untuk dapat bergabung ke dalam Uni Eropa tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Uni Eropa dalam berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan politik. Mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi Negara calon anggota baru.Setiap negara Eropa dapat bergabung dengan syarat negara tersebut memiliki kehidupan demokrasi yang stabil dan menjamin penerapan hukum, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kaum minoritas. Negara yang akan menjadi anggota juga harus memiliki perekonomian pasar yang berjalan baik dan kelengkapan pengelolaan negara yang mampu menerapkan hukum-hukum Uni Eropa.

Kriteria bagi calon anggota berlaku sama untuk semua yang ingin menunujukkan ketertarikannya, namun kondisi penerimaan berbeda tergantung dengan situasi negara tersebut. Sikap yang diberikan anggota negara pun berbeda-beda kepada masing masing calon. Seperti kondisi Kroasia yang pencalonannya ditolak oleh Slovekia akibat masalah perbatasan serta, pembatalan negoisasi dari pihak Uni Eropa juga pernah terjadi ketika Kroasia dianggap tidak serius memenuhi persyaratan yang menyandungnya, yaitu masalah penegakan HAM.

Untuk kasus Turki, sikap penolakan dan penundaan pun sering terjadi. Turki yang sejak 1959 telah menunjukkan ketertarikannya untuk menjadi anggota Uni Eropa, hingga kini masih belum jelas statusnya. Penolakan terhadap aksesi Turki ditunjukkan oleh beberapa negara seperti Austria, Bulgaria, Siprus, dan Perancis. Penolakan ini semakin jelas ditunjukkan ketika perundingan Uni Eropa-Turki dalam menangani masalah imigran. Kekhawatiran akan besarnya jumlah populasi Turki menjadi salah satu alasannya, dimana Uni Eropa menerapkan sistem kompisisi suara yang berdasarkan polling dari populasi penduduk negara anggota, yang berarti jika Turki resmi menjadi anggota akan memiliki kompisisi suara yang lebih besar daripada negara lain.

Non-Enlargment atau penundaan perluasa akan membawa dampak tidak hanya pada negara-negara anggota, tetapi juga terhadap negara kandidar. Penundaan perluasan dipastikan akan mengurangi kesempata negara kandidar untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tanpa perluasan, Uni Eropa tidak akan memiliki keuatan yang signifikan untuk memerangi masalah-masalah global seperti terorisme, imigrasi illegal dan kejahatan yang terencana. Kegagalan perluasan dapat menyebabkan timbulnya pandangan yang skeptis tentang masa depan Eropa dan Uni Eropa dari negara-negara yang berncana mencalonkan diri unutk menajadi anggota.

1. **Perkembangan Uni Eropa**
2. **Fenomena Brexit**

*British Exit* atau Brexit merupakan angin segara yang melanda Uni Eropa pada pertengahan 2016. Keputusan untuk keluar dari Uni Eropa diambil berdasarkan hasil referendum yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016, diaman mayoritas rakyat Inggris (52%) menginginkan Inggris untuk berhenti menjadi anggota Uni Eropa.[[17]](#footnote-17) Beberapa masyarakat Inggris beranggapan bahwa Inggris berada di bawah kendali penuh Uni Eropa dan tidak bisa menetapkan kebijaknnya sendiri. Brexit juga muncul akibat keresahan masyarakat Inggris soal imigran Eropa, sejak masuknya negara-negara Eropa Timur ke dalam anggota Uni Eropa tahun 2004 aliran imigran Eropa ke Inggris semakin deras.

Adalah Partai Konservatif Inggris yang mendukung adanya Brexit, partai ini menuntut kembalinya kejayaan Inggris di masa lalu. Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron merupakan politisi yang berasal dari partai ini, namun Cameron sendiri mendukung agar Inggris tetap berada di Uni Eropa. Pada Januari 2013, di bawah tekanan para anggota parlemen anti-Uni Eropa di dalam partainya sendiri dan semakin kuatnya Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP), membuat Cameron berjanji menggelar referendum Brexit jika partainya memenangkan pemilu 2015. Tujuan utama Cameron sebenarnya adalah melakukan negosiasi hubungan baru agar Inggris dengan Uni Eropa dan memenangkan dukungan public agar Inggris terus menjadi anggota Uni Eropa[[18]](#footnote-18). Hasil referendum yang berbeda dengan harapannya membuat Cameron kemudian segera memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, ia merasa bertanggung jawab karena tidak mampu mempertahankan Inggris bertahan di Uni Eropa.

Brexit memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Inggris. Sesaat setelah hasil perhitungan suara sementara keluar, Poundsterling langsung anjlok ke level terendah dan turun 10%, nilai ini terhitung terlemah sejak tahun 1985. Dampak buruk juga ditunjukkan di pasar saham dimana beberapa saham jatuh rata-rata sebesar 8% dan juga harga emas meloncat hampir 7%.[[19]](#footnote-19)

Pasca turunnya Cameron, Partai Konservatif kemudian menunjuk Theresa May sebagai pemimpin baru partai dan juga menjabat perdana menteri Inggris pada 13 Juli 2016. Proses untuk keluar dari Uni Eropa secara resmi mulai pada 29 Maret 2017 ketika Theresa May mulai memproses Brexit dengan menerapkan Pasal 50 Uni Eropa dari Perjanjian Lisbon. Yang berarti Inggris memiliki dua tahun untuk menegosiasikan hubungan baru dengan Uni Eropa sejak tanggal tersebut. Pada 16 Maret RUU meninggalkan Uni Eropa mendapat persetujuan dari kerajaan dan disahkan menajdi UU, kemudian duta besar Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.

Bagi Inggris, Brexit bisa jadi adalah awal kehancuran. Skotlandia bisa saja mengajukan referendum untuk memisahkan diri dari Inggris. Sejalan dengan Inggris, Uni Eropa juga akan mengalami kerugian dengan adanya Brexit. Karena Inggris adalah negara yang memiliki pengaruh besar bagi Uni Eropa, bagi dari segi finansial, militer, dan politik. Bagi Uni Eropa, Inggris adalah magnet bagi negara-negara non-Eropa untuk mau bekerja untuk mau bekerjasama dengan Uni Eropa. Keunggulan Inggris ini tidak dimiliki oleh negara-negara Uni Eropa, Jerman, Perancis dan Italia yang masuk dalam negara ‘the big four’ Eropa belum mampu menyaingi daya tarik Inggris di mata dunia.[[20]](#footnote-20)

Salah satu efek Brexit yang paling buruk adalah naiknya sentiment anti pendatang, dan sentiment SARA. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya data kekerasan pada mereka yang berbeda dengan warga Inggris, terlebih lagi terror bom yang terjadi sepanjang 2017 ini. Nasionalisme dan etnisitas semua yang dianggap membuat rakyat Inggris mudah diarahkan untuk memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Mengenai masa depan Inggris di Uni Eropa sepertinya masih belum ada kejelasan akankah secara pasti keluar pada 2019. Keraguan ini muncul pasca pemilu Inggris 8 Juni lalu. Theresa May mengumumkan untuk mempercepat pemilu yang sebenarnya tidak harus digelar hingga tahun 2020, dengan alasan karena partai oposisi terus mengacaukan agenda pemerintah terutama terkait isu implementasi Brexit. Tidak sedikit pengamat politik yang menduga May memutuskan menggelar pemilu karena Partai Konservatif pimpinannya unggul jauh 21 persen di sejumlah survei[[21]](#footnote-21). Hasil pemilu justru cukup mengejutkan, Partai Buruh mampu mengejar dan mengimbangi Partai Konservatif yang gagal mendapatkan suara mayortias, dimana Partai Buruh merupakan kubu yang mendukung Inggris tetap di Uni Eropa. Hal ini kemudian diikuti dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 2,3 juta pemilih Inggris keluar dari Uni Eropa menyesalkan pilihannya[[22]](#footnote-22).

Brexit cukup berperan dalam nasib aksesi Turki menuju Uni Eropa. Inggris merupakan salah satu pendukung terbesar Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, namun dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa jelas memperlemah posisi Turki. Tanpa dukungan Inggris, status keanggotaan Turki mungkin akan menjadi lebih sulit[[23]](#footnote-23). Fenomena Brexit juga sepertinya akan memicu Turki untuk kembali merekonstruksikan hubungannya dengan Eropa.

1. **Krisis Imigran**

Derasnya arus imigran yang masuk ke Eropa menjadi salah satu kekhawatiran yang harus dihadapi para pemimpin negara Eropa. Tahun 2015, jumlah total imigran yang masuk ke Uni Eropa adalah 590.000 orang, jumlah ini meningkat setiap tahunnya[[24]](#footnote-24). Sejak tahun 2011, gelombang migrasi tidak pernah berhenti. Ini diawali akibat Konflik Suriah antara pemerintah Bashar Al-Assad dan berbagai tekanan lainnya yang dimulai pada musim semi tahun 2011. Konflik ini terus menyebabkan pergeseran di dalam negeri dan seluruh wilayah. Pada akhir 2014, diperkirakan 7,6 juta pengungsi dan 3,7 juta warga Suriah telah melarikan diri dari negara sejak konflik tersebut dimulai.[[25]](#footnote-25)

Alasan mengapa para pengungsi memilih Eropa sebagai tujuannya adalah yang pertama letak geografis timur tengah yang berdekata dengan Uni Eropa dengan hanya dibatasi oleh laut mediterania. Hal ini memudahkan para pengungsi untuk ke Eropa dengan hanya menyebrangi laut tersebut dengan dalih bahwa ekonomi negara Eropa dan keadaanya lebih stabil dibandingkan dengan wilayah lain. Alasan yang kedua mengapa para pengungsi tidak mengungsi ke negara Timur Tengah lainnya adalah karena sejarah konflik geopolitik yang sejak lama telah berlangsung. Latar belakang konflik paradigma Sunni-Syiah yang menjadi salah satu cerita di belakangnya, pengungsi Suriah yang mayoritas Syiah memunculkan rasa khawatiran bagi negara-negara Arab, seperti Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab yang mayoritan Sunni. Negara-negara tersebut takut jika pengungsi Suriah masuk ke wilayah mereka aka nada infiltrasi ideology yang bergeser dari Syiah.[[26]](#footnote-26)

Respon beragam pun ditunjukkan oleh negara anggota Uni Eropa, ada yang membuka kesempatan namun ada juga yang menolak mentah-mentah. Seperti yang ditunjukkan oleh Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Rumai dan Slovakia yang dengan tegas menolak skema kuota wajib untuk menampung 120.000 imigran. Terlebih lagi Hungaria yang memasang pagar berkawat di sepanjang area perbatasannya untuk mencegah masuknya para pengungsi tersebut[[27]](#footnote-27). Polemik keamanan serta beban negara menjadi salah satu alasan.

Sebelumnya Uni Eropa memerintahkan negara anggota untuk ikut menerima para pengungsi, atau harus membayar 250 ribu euro untuk setiap pencari suaka yang mereka tolak. Uang tersebut nantinya akan diberikan untuk Yunani, Jerman dan Italia yang saat ini menampung pengungsi dalam jumlah besar. Jerman merupakan salah satu tujuan mayoritas imigran dikarenakan memiliki daya Tarik sangat kuat bagi para pengungsi karena tiga pilar, yaitu demokrasi yang kuat, sejarah panjang penerimaan imigran, dan stabilitas ekonomi.

Uni Eropa kemudian merangkul Turki untuk ikut mengatasi masalah pengungsian ini. Pada Maret 2016, Turki dan Uni Eropa bersepakat untuk menangani krisis imigran dengan menjadikan Turki sebagai ‘pintu eropa’. Turki selama ini digunakan sebagai tujuan transit para pengungsi. Dalam kesepakatan tersebut, Turki setuju untuk menampung semua migran tak berdokumen resmi yang menyeberang dari Turki ke Yunani. Kedua pihak juga setuju melakukan pertukaran untuk setiap migran asal Suriah yang dikembalikan ke Turki dan mengirim pengungsi Suria yang telah berada di Turki ke Uni Eropa. Turki kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan visa Schengen bagi warga negaranya dan juga agar kembali membuka negosiasi aksesi keanggotaannya di Uni Eropa.[[28]](#footnote-28)

1. **Terorisme**

Beberapa tahun terakhir ini wilayah Uni Eropa kerap menjadi target teroris. Serangan-serangan tersebut dilakukan dengan senjata, bom dan kadang memakai fasilitas publik. Hampir semua serang terror yang diarahkan ke Eropa dicurigai memiliki hubungan dengan ISIS. Sebenarnya terorisme di Eropa sudah berlangsung sejak tahun 1970-an dan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok anarkis, kelompok etno sosial dan separatis serta kelompok sayap kiri, seperti Tentara Republik Irlandia di Irlandia Utara, *Basque Homeland and Freedom* atau dikenal sebagai ETA di Basque Country di Spanyol utara.Di Eropa Timur, serangan menjadi lebih sering setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Memasuki tahun 2014 barulah marak terjadi penyerangan teroris yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama atau kelompok jihad.

Badan keamanan Uni Eropa yaitu Europol, membentuk *Europol Counter Terrorism Centre* (ECTC) pada 2016 yang berfokus untuk melawan dan menangani terorisme. Badan ini dibentuk pasca terjadinya serang Paris pada November 2015. Berdasarkan laporan tahunan Europol mengenai terorisme yang baru saja dikeluarkan pada 2017 ini, selama 2016 terdapat 142 serangan dan upaya serangan yang terjadi di Eropa. Sebanyak 76 serangan berada di Inggris Raya, 23 di Perancis, Italia 17 serangan, Spanyol sebanyak 10, 6 di Yunani, 5 serangan di Jerman, disusul Belgia sebanyak 4 serta 1 serangan di Belanda. Dari semua negara tersebut total sebanyak 142 korban meninggal dan 379 orang terluka akibat serangan terorisme dimana sebagian besar diakibatkan oleh serangan kelompok jihad[[29]](#footnote-29). Meskipun begitu Europol juga melaporkan bahwa jumlah serangan terbesar berasal dari kelompok etno sosial dan kelompok separatis, dan serangan dari kelompok sayap kiri yang lebih banyak terjadi di Italia, sedangkan jumlah serangan dari kelompok jihad menurun dari 2015 sebanyak 17 dan 2016 sebanyak 13 serangan. Namun masifnya jumlah korban yang diakibatkan oleh serangan kelompok jihad serta luasnya jaringan dan keterkaitannya dengan ISIS serta Al-Qaeda membuat Europol dan Uni Eropa semakin memfokuskan diri kepada kelompok ini dibandingkan kelompok yang lain.

Negara-negara Uni Eropa pun khawatir bahwa setiap ada kebijakan Uni Eropa yang dipandang tidak sejalan dengan kepentingan pihak-pihak yang bertikai di Timur Tengah akan diikuti dengan terjadinya peningkatan kekerasan yang dilakukan kelompok Islam radikal di Uni Eropa yang pada gilirannya dapat mengakibatkan jatuhnya korban secara massal. Kekhawatiran tersebut semakin kuat sejalan dengan meningkatnya proses radikalisasi umat Muslim yang tinggal di Uni Eropa dan penyebarluasan pengaruh ajaran ISIS dan Al-Qaeda lewat internet diperkirakan akan semakin mendorong meningkatnya ancaman terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal di langit Eropa.[[30]](#footnote-30)

Menyadari kecenderungan yang terjadi dan meningkatnya potensi ancaman dan serangan teror, Uni Eropa pun semakin mengintensifkan kerja sama penanggulangan terorisme dengan melibatkan Europol dan badan-badan Uni Eropa lainnya; mendorong dilakukannya proses deradikalisasi; mendorong negara-negara Uni Eropa mengeluarkan kebijakan penanggulangan terorisme guna memperkuat pengawasan dan dimungkinkannya dilakukan penahanan terhadap individu yang diduga terkait gerakan kelompok Islam radikal; dan melakukan penangkalan situs-situs di internet yang memuat anti-semit, terorisme dan kebencian.

Salah satu isu teroris yang terkait dengan Turki dan menjadi ranah perhatian Uni Eropa adalah kelompok PKK. Kelompok PKK atau Partai Pekerja Kurdi merupakan sebuah gerakan separatis sayap kiri yang berada di wilayah tenggara Turkis. Kelompok ini berbasis mayoritas berbasis di Turki dan Irak. Tujuan dari PKK adalah untuk mendirikan negara Kurdi yang merdeka dan sosialis di Kurdistan yang ada di sekitar wilayah tenggara Turki, barat laut Irak, timur laut Suriah dan barat laut Iran dimana mayoritas penduduk Kurdi berada. Sejarah Turki-PKK sudah berlangsung sejak lama, Turki menempatkan kelompok separatis Kurdi sebagai ancaman nyata keamanan nasional, militer Turki sendiri telah aktif melawan terror PKK terutama sejak pertengahan 1980-an[[31]](#footnote-31). Hal ini kemudian diperkuat ketika Uni Eropa mengategorikan PKK sebagai salah satu kelompok teroris yang kini semakin memperluas aktifitasnya di Eropa.

Sejauh ini langkah-langkah Uni Eropa untuk menanggulangi terorisme secara statistik memang berhasil menunjukkan angka yang rendah dibandingkan di serangan teroris di kawasan lainnya. Uni Eropa berhasil mencegah terjadinya aksi terorisme seminimal mungkin dan menjadikan Uni Eropa jauh lebih aman dibandingkan dengan berbagai kawasan lainnya seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.  Namun selama negara-negara Uni Eropa belum mampu menghilangkan masalah internal berupa konflik etno nasionalitas ataupun diskriminasi rasial terhadap Muslim yang tinggal di Uni Eropa serta pandangan streotype terhadap umat Muslim, maka sepanjang itu pula negara-negara Uni Eropa tidak bisa bebas dari ancaman terorisme.

1. Nuraeini dkk, Op.Cit., hal 159. [↑](#footnote-ref-1)
2. “The EU in Brief”, dalam <https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en> diakses pada 25 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Immanuel dan Wahyudi. Op.Cit., hal 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid., hal 41. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., hal 45-46. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., hal 70-72 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., hal 75. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid., hal 88. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., hal 27 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., hal 28. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
12. “European Council”, dalam <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_en> diakses pada 27 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. Immanuel dan Wahyudi, Op.Cit., hal 19. [↑](#footnote-ref-13)
14. “Conditions For Membership”, dalam <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en> diakses pada 28 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Adhi Wardana. Op.Cit., hal 54. [↑](#footnote-ref-15)
16. “Chapter of The Acquis”, dalam <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en> diakses pada 28 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Eko Trijuni, “Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Brexit”, dalam <http://www.foreximf.com/forex-review/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-brexit/> diakses pada 29 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. “Hari Ini Dalam Sejarah: Inggris Pilih Keluar Dari Uni Eropa”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/23/18300061/hari.ini.dalam.sejarah.rakyat.inggris.pilih.keluar.dari.uni.eropa.?page=all> diakses pada 29 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. “Inggris Tinggalkan UE, Poundsterling Terpuruk Ke Titik Terendah”, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160624_dunia_poundsterling_terpuruk> diakses pada 29 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. Immanuel dan Wahyudi, Op.Cit., hal 181 [↑](#footnote-ref-20)
21. “Mengejutkan, PM May Umumkan Pemilu Dini di Inggris Digelar 8 Juni”, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/18/20395461/mengejutkan.pm.may.umumkan.pemilu.dini.di.inggris.digelar.8.juni>, diakses pada 29 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. “Hasil Penelitian: 2,3 Juta Warga Inggris Menyesal Telah Memilih “Brexit””, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/01/22000611/hasil.penelitan.2.3.juta.warga.inggris.menyesal.telah.memilih.brexit>, diakses pada 29 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-22)
23. Polat Urundul, “ Brexit: The Impact On The EU And Turkey”, dalam <http://www.bitaf.org/brexit-impact-on-the-eu-and-turkey/>, diakses pada 30 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-23)
24. Immanuel dan Wahyudi, *Op.Cit*., hal 172 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ostrand, Nicole. “The Syirian Refugees Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, United Kingdom and United States”. dalam *On Migration and Human Security* hal. 255-256 [↑](#footnote-ref-25)
26. Hanna Azarya Samosir, “Mengapa Imigran Ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah?”, CNN (online), Jakarta, 8 September 2015, dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah/>, diakses pada 31 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-26)
27. Rohmatin Bonasir, “Di Balik Penolakan Imigran oleh Eropa Timur”, BBC (online), Jakarta, 23 September 2015, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150923_dunia_imigran_eropatimur>, diakses pada 31 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-27)
28. “Kesepaktan Uni Eropa dan Turki Soal Migran Resmi Berlaku” dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160320_dunia_turki_unieropa_migran>, diakses pada 31 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-28)
29. “EU Terrorism and Trend Report (TE-SAT) 2017”, dalam <https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/>, diakses pada 1 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-29)
30. Aris Heru Utomo, “Ancaman Terorisme di Langit Eropa”, Detiknews (online), Jakarta, 4 Januari 2016, dalam <http://news.detik.com/kolom/3110197/ancaman-terorisme-di-langit-eropa>, diakses pada 2 Agustus. [↑](#footnote-ref-30)
31. M Alfan Alfian, *Op.Cit*., hal. 121. [↑](#footnote-ref-31)